

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH), DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2023)

Yesy Putri Agustina¹, Indra Lila Kusuma², Wikan Budi Utami³

^{1,2,3}Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Email : agustinayessy5@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2023. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif kausal. Sampel yang digunakan adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan metode sampling jenuh sehingga diperoleh 105 sampel. Teknik analisis data yaitu Analisis Regresi Berganda dengan bantuan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, serta Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

This study aims to determine whether there is an influence of Regional Original Income, General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund and Capital Expenditure on the Level of Regional Financial Independence of Regencies or Cities in Central Java Province in 2021-2023. The research method uses a causal quantitative approach. The sample used was 35 regencies/cities in Central Java Province using the saturated sampling method so that 105 samples were obtained. The data analysis technique is Multiple Regression Analysis with the help of SPSS 23. The results of this study indicate that Regional Original Income has a positive and significant effect on the level of regional financial independence, General Allocation Fund and Revenue Sharing Fund have a negative and significant effect on the level of regional financial independence, and Capital Expenditure has a negative and insignificant effect on the level of regional financial independence.

Keywords: Capital Expenditure, General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Regional Financial Independence, Regional Original Income

Article history

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism checker no 886

prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author Publish
by : musytari

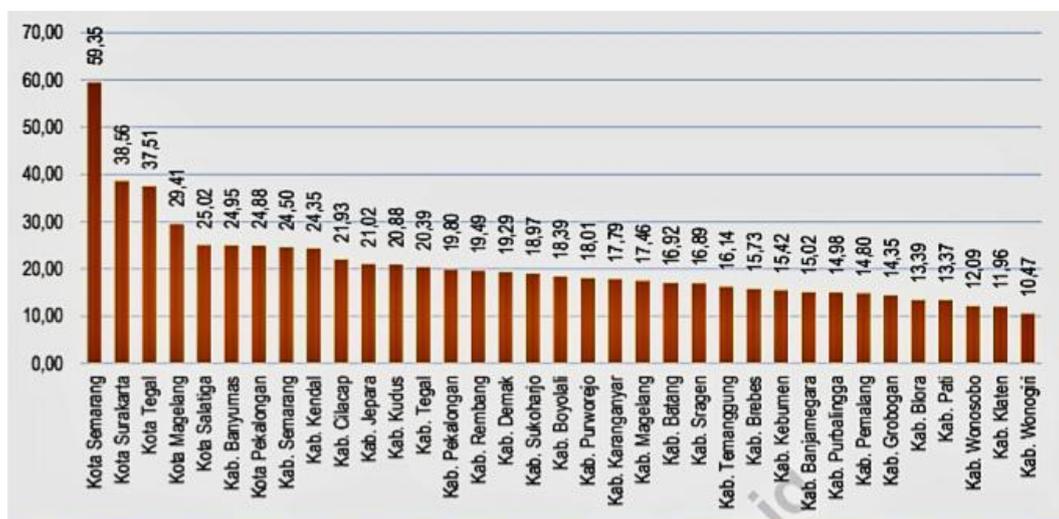


This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Otonomi daerah dan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana sistem pemerintahan beralih dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangannya secara mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Tujuan otonomi daerah ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

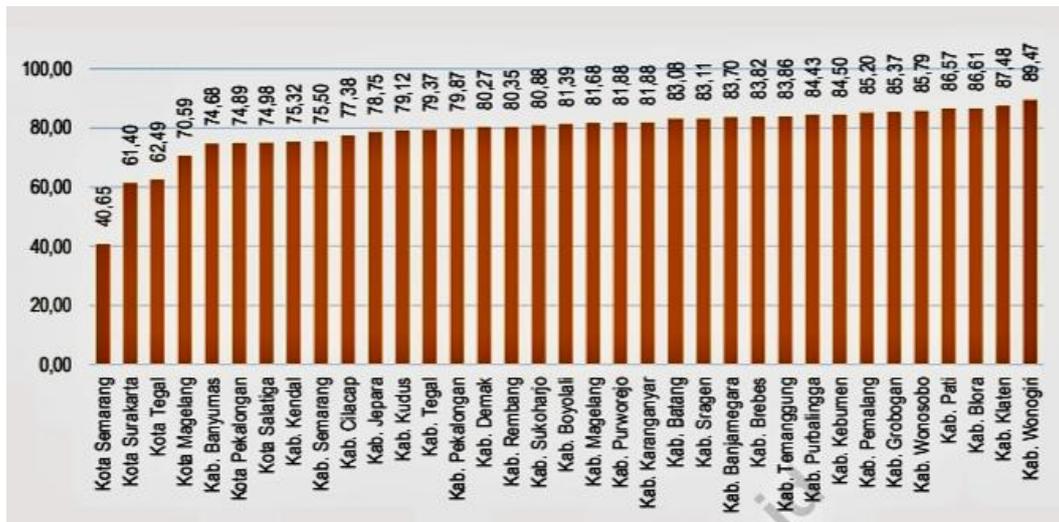
Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah (Mbipi et al., 2020), dapat dilihat dan diukur dari besarnya efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu ada dana yang berasal dari pihak luar daerah, seperti dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana pinjaman yang diperoleh tiap Pemerintah daerah, baik itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota (Abdullah et al., 2015). Penggunaan dana yang berasal dari pihak luar daerah yang lebih dominan dalam mendanai belanja dan kebutuhan pemerintah daerah, menunjukkan kurang siapnya daerah dalam bersaing serta dalam memberanikan diri untuk meningkatkan kemandiriannya sekaligus memaksimalkan potensi, sumber daya, dan kekayaan yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kemandirian keuangan, daerah diharapkan mampu mengelola keuangannya sendiri secara efektif dan efisien (Mahmudi, 2016).



Gambar 1.1

Rasio Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota Pemerintah Se-Jawa Tengah 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023



Gambar 1.2

Rasio Anggaran Pendapatan Transfer Kab/Kota Pemerintah Se-Jawa Tengah 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 35 kabupaten/kota, memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang sangat bervariasi. Berdasarkan data BPS Jawa Tengah tahun 2023, Kota Semarang merupakan daerah dengan tingkat desentralisasi fiskal tertinggi (rasio PAD terhadap total pendapatan sebesar 59,35%), diikuti oleh Kota Surakarta (38,56%) dan Kota Tegal (37,51%). Sebaliknya, Kabupaten Wonogiri memiliki rasio ketergantungan terhadap dana transfer pusat yang sangat tinggi, mencapai 89,47%. menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan fiskal antar daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dominasi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah dapat menimbulkan ketergantungan fiskal yang tinggi, serta melemahnya kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal. DAU dan DBH memang berfungsi untuk mengatasi ketimpangan fiskal, namun di sisi lain dapat mengurangi dorongan daerah untuk meningkatkan PAD secara optimal. Belanja modal juga memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berpotensi meningkatkan PAD secara jangka panjang, namun efisien dan prioritas alokasi anggaran masing-masing Kab/Kota dipengaruhi seberapa efektif belanja modal dalam mendorong kemandirian keuangan daerah. .

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam. Penelitian oleh Nindita dan Rahayu (2019) serta Mahardika dan Fauzan (2022), Pratiwi (2024) menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Di sisi lain, penelitian oleh Almas (2021) menunjukkan bahwa PAD dan DBH tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini dilakukan karena *research gap* dari penelitian sebelumnya.

LANDASAN TEORI

1. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai urusan pemerintahan secara mandiri tanpa ketergantungan tinggi pada transfer dari pemerintah pusat (UU No. 23 Tahun 2014). Rasio Kemandirian dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Menurut Abdul Halim dalam Azhari (2017), tingkat kemandirian keuangan diklasifikasikan ke dalam empat kategori:

Tabel 2.1
Kriteria Rasio kemandirian Keuangan Daerah

Presentase Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah sekali	Instruktif
25% - 50%	Rendah	Konsultatif
50% - 75%	Sedang	Partisipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Abdul Halim dalam Azhari (2017)

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kriteria utama kemandirian fiskal daerah. PAD diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan sah (UU No. 28 Tahun 2009).

Menurut Mustofa (2019) PAD berperan penting dalam pembiayaan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal secara optimal.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah yang bersumber dari APBN untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan pemerataan fiskal antar daerah (Permenkeu No. 139/PMK.07/2019). Besarnya DAU dihitung berdasarkan Alokasi Dasar dan Celah Fiskal. Ketergantungan terhadap DAU yang tinggi mencerminkan rendahnya kemandirian fiskal suatu daerah.

4. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana transfer dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan kontribusi penerimaan pajak atau sumber daya alam. DBH bertujuan mendukung pelaksanaan desentralisasi dan mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah (UU No. 33 Tahun 2004). Terdiri dari DBH Pajak dan DBH SDA, alokasi DBH memperhatikan prinsip daerah penghasil (*by origin*) dan realisasi penerimaan aktual (*based on actual revenue*).

5. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran untuk memperoleh aset tetap yang mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah (PP No. 71 Tahun 2010). Investasi belanja modal ini bertujuan meningkatkan kapasitas infrastruktur, yang secara tidak langsung dapat memperkuat PAD dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah (Mahmudi, 2016).

HIPOTESIS

H1 : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

H2 : Dana Alokasi Umum Berpengaruh Signifikan Negatif Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

H3 : Dana Bagi Hasil Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

H4 : Belanja Modal Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal, yaitu untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD yang dipublikasikan oleh DJPK Kementerian Keuangan, atau Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.

Populasi penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) seluruh 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota.

Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik sensus sampling atau sampling jenuh sehingga diperoleh 105 sampel yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama 3 tahun (2021-2023).

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS versi 23. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, data dianalisis secara deskriptif dan diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji *normalitas*, *multikolinearitas*, *heteroskedastisitas*, dan *autokorelasi*. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji kelayakan model (uji F), uji parsial (uji t), serta uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui kontribusi model terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_PAD	105	240,96	2835,15	485,7141	385,46556
X2_DAU	105	409,63	1352,88	915,8439	235,55191
X3_DBH	105	29,88	342,88	67,0486	58,74291
X4_BM	105	75,19	1089,36	305,7223	164,84448
Y_TKKD	105	10,47	59,35	20,5426	8,09690
Valid N (listwise)	105				

Sumber: DJPK, diolah SPSS 23, 2025

Tabel di atas menyajikan hasil analisis statistik deskriptif sebagai berikut: (1) Variabel PAD memiliki nilai terendah sebesar 240,96 dan tertinggi 2835,15, dengan rata-rata sebesar 485,71 serta standar deviasi 385,47. (2) Variabel DAU menunjukkan nilai minimum sebesar 409,63 dan maksimum 1352,88, dengan nilai rata-rata sebesar 915,84 dan standar deviasi sebesar 235,55. (3) Variabel DBH memiliki nilai terkecil 29,88 dan tertinggi 342,88, dengan nilai rata-rata sebesar 67,05 dan deviasi standar 58,14. (4) Variabel Belanja Modal mencatat nilai minimum sebesar 75,19 dan maksimum 1089,36, dengan rata-rata 305,72 dan standar deviasi 164,84. (5) Variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah memiliki rentang nilai antara 10,47 hingga 59,35, dengan nilai rata-rata 20,54 dan standar deviasi 8,09. Rata-rata yang tinggi mencerminkan capaian variabel yang besar, sedangkan nilai standar deviasi menunjukkan sejauh mana variasi atau penyebaran data antar daerah.

Uji Normalitas

Tabel 4.2
Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		105
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	3,12859708
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,074
	<i>Positive</i>	0,074
	<i>Negative</i>	-0,054
<i>Test Statistic</i>		0,074
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,183 ^c

Sumber : DJPK, diolah SPSS 23, 2025

Berdasarkan hasil tabel 4.2 diatas dapat dilihat nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) sebesar 0,183 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas

Model	<i>Standardized</i>		t	Sig.	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Unstandardized Coefficients</i>	<i>Coefficients</i>			<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
	B	<i>Std. Error</i>	Beta			
1 (Constant)	30,589	1,311		23,327	0,000	
X1_PAD	0,022	0,001	1,064	15,075	0,000	0,299
X2_DAU	-0,020	0,002	-0,584	-12,521	0,000	0,686
X3_DBH	-0,018	0,006	-0,130	-2,890	0,005	0,734
X4_BM	-0,004	0,004	-0,087	-1,098	0,275	0,237

Sumber : DJPK, diolah SPSS 23, 2025

Berdasarkan hasil tabel 4.3 terlihat hasil uji multikolinearitas yaitu sebesar 0,299 (PAD), 0,686 (DAU), 0,734 (DBH), dan 0,237 (BM) merupakan *tolerance value* > 0.10 sedangkan nilai VIF 3,339 (PAD), 1,458 (DAU), 1,362 (DBH), dan 4,225 (Belanja Modal) merupakan nilai VIF < 10 sehingga semua variabel tidak terdapat gejala multikolinearitas sehingga dapat digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.4
Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize	t	Sig.
		B	Std. Error	d Coefficients Beta		
1	(Constant)	-0,926	5,383		-0,172	0,864
	X1_PAD	0,975	0,699	0,228	1,395	0,166
	X2_DAU	-0,436	0,686	-0,074	-0,636	0,526
	X3_DBH	-0,004	0,003	-0,146	-1,291	0,200
	X4_BM	0,000	0,002	0,016	0,095	0,924

Sumber : DJPK, diolah SPSS 23, 2025

Berdasarkan hasil tabel 4.5 diperoleh nilai signifikansi (sig.) PAD sebesar 0,166, DAU sebesar 0,526, DBH sebesar 0,200, dan BM sebesar 0,924 menunjukkan nilai signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas sehingga dapat digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya

Uji Autokorelasi

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,922 ^a	0,851	0,845	3,19056	1,976

Sumber: DJPK, diolah SPSS 23, 2025

Berdasarkan hasil tabel 4.6 di atas nilai uji DW 1,976. Dikatakan bahwa nilai d sebesar 1.976 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1,760 dan kurang dari (4-dU) = 2,240 sehingga diperoleh nilai $dU < d < (4-dU)$ yaitu $1,760 < 1,976 < 2,240$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi, sehingga dapat digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.6
Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize	t	Sig.
		B	Std. Error	d Coefficients Beta		
1	(Constant)	30,589	1,311		23,327	0,000
	X1_PAD	0,022	0,001	1,064	15,075	0,000
	X2_DAU	-0,020	0,002	-0,584	-12,521	0,000
	X3_DBH	-0,018	0,006	-0,130	-2,890	0,005
	X4_BM	-0,004	0,004	-0,087	-1,098	0,275

Sumber: DJPK, diolah SPSS 23, 2025

Berdasarkan hasil tabel 4.6 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah (Y)} = 30,589 + 0,022 X1_PAD - 0,020 X2_DAU - 0,018 X3_DBH - 0,004 X4_BM + e$$

Dimana :

- Nilai konstanta sebesar 30,589 menunjukkan bahwa apabila variabel PAD, DAU, DBH dan Belanja Modal bernilai nol maka nilai tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 30,589.
- Koefisien regresi PAD sebesar 0,022 artinya jika PAD naik 1 satuan maka tingkat kemandirian daerah naik sebesar 0,022 satuan dengan asumsi variabel lain (DAU, DBH dan Belanja Modal) konstan dan sebaliknya apabila PAD menurun 1 satuan maka tingkat kemandirian akan menurun sebesar 0,022 satuan dengan asumsi variabel lain (DAU, DBH, dan Belanja Modal) tetap konstan.
- Koefisien regresi DAU sebesar -0,020 artinya jika DAU naik 1 satuan maka tingkat kemandirian daerah akan turun sebesar 0,020 satuan dengan asumsi variabel lain (PAD, DBH dan Belanja Modal) konstan dan sebaliknya apabila DAU menurun 1 satuan maka tingkat kemandirian akan meningkat sebesar 0,020 satuan dengan asumsi variabel lain (PAD, DBH, dan Belanja Modal) tidak berubah.
- Koefisien regresi DBH sebesar -0,018 artinya jika DBH naik 1 satuan maka tingkat kemandirian daerah akan turun sebesar 0,018 satuan dengan asumsi variabel lain (PAD, DAU dan Belanja Modal) konstan dan sebaliknya apabila DBH menurun 1 satuan maka tingkat kemandirian akan meningkat sebesar 0,018 satuan dengan asumsi variabel lain (PAD, DAU, dan Belanja Modal) tidak berubah.
- Koefisien regresi Belanja Modal sebesar -0,004 artinya jika Belanja Modal naik 1 satuan maka tingkat kemandirian daerah akan turun sebesar 0,004 satuan dengan asumsi variabel lain (PAD, DAU dan DBH) konstan dan sebaliknya apabila Belanja Modal menurun 1 satuan maka tingkat kemandirian akan meningkat sebesar 0,004 satuan dengan asumsi variabel lain (PAD, DAU, dan DBH) tetap berubah.

f. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 4.7
Uji F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5800,247	4	1450,062	142,447	0,000 ^b
	Residual	1017,964	100	10,180		
	Total	6818,211	104			

Sumber: DJPK, diolah SPSS 23, 2025

Hasil Uji F diketahui F hitung sebesar 142,447 > F tabel 2,4 dan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05 maka PAD, DAU, DBH dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

g. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.8
Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize	t	Sig.
	B	Std. Error	d Coefficients Beta		
1 (Constant)	30,589	1,311		23,327	0,000
X1_PAD	0,022	0,001	1,064	15,075	0,000
X2_DAU	-0,020	0,002	-0,584	-12,521	0,000
X3_DBH	-0,018	0,006	-0,130	-2,890	0,005
X4_BM	-0,004	0,004	-0,087	-1,098	0,275

Sumber: DJPK, diolah SPSS 23, 2025

- X1_PAD diketahui t-hitung sebesar 15,075 > t-tabel sebesar 1,983 dengan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap TKKD. Semakin tinggi PAD, semakin tinggi pula TKKD.
- X2_DAU diketahui t-hitung sebesar -12,521 < t-tabel sebesar -1,983 dengan nilai Sig sebesar 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TKKD. Semakin besar ketergantungan pada DAU, semakin rendah kemandirian daerah.
- X3_DBH diketahui t-hitung sebesar -2,890 < t-tabel sebesar -1,983 dengan nilai Sig sebesar 0,005 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TKKD.
- X4_BM diketahui t-hitung sebesar -1,098 > t-tabel sebesar -1,983 dengan nilai Sig sebesar 0,275 > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap TKKD.

Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Tabel 4.9
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,922 ^a	0,851	0,845	3,19056

Sumber: DJPK, diolah SPSS 23,2025

Dari tabel dapat dilihat nilai *Adjusted R²* sebesar 0,845 hal ini mengidentifikasi bahwa PAD, DAU, DBH, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 84,5% sedangkan 15,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai sig 0,000 ≤ 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,022 dengan nilai t-hitung sebesar 15,075 > t-tabel sebesar 1,983 menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif

dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Semakin banyak kontribusi PAD yang dapat diterima oleh suatu daerah, maka Provinsi Jawa Tengah semakin mampu membiayai operasi pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Verawaty, et al.(2017), Nindita & Rahayu (2019), Mahardika & Fauzan (2022), serta Pratiwi (2024) menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa Dana Alokasi Umum memiliki nilai sig $0,000 \leq 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar

$-0,020$ dengan nilai t-hitung sebesar $-12,521 < t\text{-tabel}$ sebesar $-1,983$ menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Semakin besar alokasi DAU yang diterima suatu daerah, semakin rendah tingkat kemandiriannya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Almas (2021) dan Mahardika & Fauzan (2022) menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa Dana Bagi Hasil memiliki nilai sig $0,005 \leq 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar $-0,018$ dengan nilai t-hitung sebesar $-2,890 < t\text{-tabel}$ sebesar $-1,983$ menunjukkan bahwa DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Semakin tinggi Dana Bagi Hasil yang diterima suatu daerah, semakin rendah tingkat kemandirian fiskalnya. Hal ini mencerminkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan lemahnya upaya dalam mengoptimalkan PAD.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Verawaty et al. (2017) menyatakan bahwa DBH berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa Belanja Modal memiliki nilai sig $0,275 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar $-0,004$ dengan nilai t-hitung sebesar $-1,098 > t\text{-tabel}$ sebesar $-1,983$ menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Meskipun pemerintah daerah memberikan dana untuk belanja modal, hal ini tidak selalu berdampak langsung pada peningkatan kemandirian keuangan. Ini mungkin karena belanja modal belum digunakan dengan benar untuk menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Almas (2022) dan Mahardika & Fauzan (2022) menyatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

KESIMPULAN

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan dibuktikan nilai Sig $0,000 < 0,05$ serta nilai koefisien regresi sebesar 0,022 dengan nilai t hitung sebesar 15,075 yang berarti semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan dibuktikan nilai Sig $0,000 < 0,05$ serta nilai koefisien regresi sebesar -0,020 dengan nilai t hitung sebesar -12,251 yang berarti semakin besar ketergantungan pada DAU, justru semakin rendah kemandirian keuangan daerah.
3. Dana Bagi Hasil juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan dibuktikan nilai Sig $0,005 < 0,05$ serta nilai koefisien regresi -0,018 dengan nilai t hitung -2,890 yang berarti peningkatan DBH tidak mendorong kemandirian, karena masih termasuk dana transfer pusat.
4. Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan dibuktikan nilai Sig $0,275 > 0,05$ serta nilai koefisien regresi -0,004 dengan nilai t hitung -1,098 yang berarti kemungkinan karena belum tepat sasaran, masih tingginya ketergantungan pada dana pusat, serta dampak belanja modal yang bersifat jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., Asmawanti, D., & Febriansyah. (2015). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Se-Sumatera Bagian Selatan*. *Jurnal Akuntansi FEB Universitas Bengkulu*, 3(1), 41-67
- Almas, A. B. (2022). *Pengaruh Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (studi empiris pada daerah-daerah tertinggal di Indonesia dalam strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal Tahun 2021)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
- Azhari, F. R. (2017). *Analisis tingkat kemandirian, efektivitas, efisiensi pendapatan asli daerah (PAD) pada pemerintah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat*. (Tugas Akhir, Politeknik Negeri Bandung).
- Mahardika, E. P., & Fauzan, F. (2022). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019)*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 407-416. <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i1.746>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mbipi, D. S., Assih, P., & Sumtaky, M. (2021). *Pengelolaan keuangan daerah dan good governance terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah*. *Accounting and Financial Review*, 3(2), 152-158. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.5503>
- Mustofa, U. A., & Sari, N. P. (2020). *Kontribusi pajak dan retribusi parkir terhadap PAD Kota Bandar Lampung tahun 2014-2018 dalam Ekonomi Islam*. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 51-70. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v8i1.2007>
- Nindita, N. L., & Rahayu, S. (2018). *Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) serta belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat*. *Journal Accounting and Finance*, 2(1), 12-19. <https://journal.telkomuniversity.ac.id/jaf>

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 129 Halaman. Jakarta, 7 Oktober 2019; diundangkan 8 Oktober 2019. (Dicabut oleh PMK No.67/PMK.07/2024). (peraturan.bpk.go.id)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165. Jakarta, 22 Oktober 2010. (peraturan.bpk.go.id)

Pratiwi, R. D. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (*Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah 2018-2022*). Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587. (peraturan.go.id)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049. (peraturan.bpk.go.id)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438

Verawaty, V., Fransisca, S., & Rahmawati, R. (2017). *Determinan tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Journal Management, Business, and Accounting, 16(1), 1-10.*